

Laporan Kinerja (LKJ)

Tahun 2022

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Kata Pengantar



Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-NYA sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2022 ini dengan baik. Substansi yang tertuang di dalam laporan kinerja ini adalah segala pelaksanaan kegiatan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari pelaporan kinerja ini adalah : 1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta 2) sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan memerlukan perbaikan pada laporan ini. Oleh karena itu kami mengharapkan Bapak, Ibu dan rekan-rekan untuk memberikan saran serta kritik yang dapat membangun. Kritik konstruktif dari bapak, ibu dan para pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan periode selanjutnya.

Akhir kata semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian.

Jakarta, 13 Januari 2023
Direktur Perizinan dan Kenelayanan



Ukon Ahmad Furkon

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	LATAR BELAKANG	1
1.2	MAKSUD DAN TUJUAN	
1.3	TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
1.3.1	KOORDINATOR BIDANG TATA PERIZINAN	4
1.3.2	KOORDINATOR BIDANG HARMONISASI DAN PEMANTAUAN PERIZINAN	4
1.3.3	KOORDINATOR BIDANG KELEMBAGAAN DAN PERLINDUNGAN NELAYAN	5
1.3.4	KOORDINATOR BIDANG USAHA NELAYAN	6
1.3.5	SUBKOORDINATOR BIDANG TATA USAHA	7
1.3.6	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	7
1.4	SISTEMATIKA PENYAJIAN	7
BAB 2	PERENCANAAN KINERJA	11
2.1	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024	9
2.2	SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN ANGGARAN	10
2.3	RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA	10
BAB 3	AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
3.2	ANALISIS CAPAIAN KINERJA	15
3.2.1	PENGELOLAAN KENELAYANAN MAJU DAN BERDAYA SAING	15
	IKU 1 PERSENTASE PENGELOLAAN KENELAYANAN MAJU DAN BERDAYA SAING	
3.2.2	PENGELOLAAN PERIZINAN SESUAI KETENTUAN	16
	IKU 2 PERSENTASE PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PERIKANAN TANGKAP SESUAI KETENTUAN	
	IKU 3 PENERIMAAN PNBP SEKTOR SDA LINGKUP DITJEN PERIKANAN TANGKAP	
3.2.3	PENGELOLAAN SARANA PEMUNGUTAN PNBP PASCA PRODUKSI	18
	IKU 4 PERSENTASE PEMENUHAN SARANA PEMUNGUTAN PNBP PASCA PRODUKSI	
3.2.4	KORPORASI NELAYAN YANG DIKEMBANGKAN	19
	IKU 5 JUMLAH KORPORASI NELAYAN YANG DIKEMBANGKAN	

3.2.5	TENAGA KERJA YANG TERLIBAT PADA PENGELOLAAN PDK	20
	IKU 6 JUMLAH TENAGA KERJA YANG TERLIBAT PADA PENGELOLAAN DIT. PDK	
3.2.6	TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DILINGKUNGAN DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	21
	IKU 7 NILAI REKONSILIASI KINERJA DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	
	IKU 8 IP ASN DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	
	IKU 9 PERSENTASE UNIT DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR	
	IKU 10 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN	
	IKU 11 TINGKAT EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS / STRATEGIS DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	
	IKU 12 PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	
3.3	AKUNTABILITAS KEUANGAN	27
PENUTUP		
DATA DUKUNG		

DAFTAR TABEL

TABEL 1	RENCANA KINERJA DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN TAHUN 2022
TABEL 2	KOMPOSISI ANGGARAN BERDASARKAN JENIS KEGIATAN TAHUN 2022
TABEL 3	RENCANA AKSI IKU TAHUN 2022
TABEL 4	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS (SK) DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN TW III TAHUN 2022
TABEL 5	PERSENTASE KENELAYANAN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING
TABEL 6	PERSENTASE PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PERIKANAN TANGKAP SESUAI KETENTUAN
TABEL 7	PERBANDINGAN PERSANTESE PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PERIKANAN TANGKAP SESUAI KETENTUAN
TABEL 8	PENERIMAAN PNBP SEKTOR SDA LINGKUP DITJEN PERIKANAN TANGKAP
TABEL 9	PERBANDINGAN CAPAIAN PENERIMAAN PNBP SEKTOR SDA LINGKUP DITJEN PERIKANAN TANGKAP
TABEL 10	PENGELOLAAN SARANA PEMUNGUTAN PNBP PASCA PRODUKSI
TABEL 11	KORPORASI NELAYAN YANG DIKEMBANGKAN
TABEL 12	TENAGA KERJA YANG TERLIBAT PADA PENGELOLAAN PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 13	NILAI REKONSILIASI KINERJA DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 14	INDEKS PROFESIONAL (IP) ASN LINGKUP DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 15	PERSENTASE UNIT DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN YANG MENERAPKAN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR
TABEL 16	PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE MP
TABEL 17	PERSENTASE HASIL REKOMENDASI PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 18	PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE HASIL REKOMENDASI PENGAWASAN
TABEL 19	TINGKAT EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS / STRATEGIS DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 20	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 21	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN 2022

DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIT. PDK
- GAMBAR 2 DASHBOARD KINERJAKU CAPAIAN KINERJA DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN
- GAMBAR 3 DASHBOARD APLIKASI KINERJAKU CAPAIAN TRIWULAN III DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN TAHUN 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 117.825.000.000,- yang tertuang pada DIPA Tahun 2022 dengan nomor Surat Pengesahan DIPA-032.03.1.465023/2021 Tanggal 17 November 2021. Untuk mencapai program yang telah direncanakan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2022 memiliki 6 Sasaran Kerja yang didukung oleh 12 Indikator Kinerja Utama. Sebagaimana yang disajikan pada tabel sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS		Kode IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	
				Tahun 2022	Tahun 2022	Persentase (%)
1	Pengelolaan kenelayanan maju dan bersaing	1	Persentase pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing (persen)	100	152,09	152,09
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	2	Persentase pengelolaan perizinan berusaha sub sektor perikanan tangkap sesuai ketentuan (persen)	100	113,11	113,11
		3	Penerimaan PNBP sektor SDA lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (triliun)	1,627	1,193	73,33
3	Pengelolaan sarana pemungutan PNBP Pasca produksi	4	Persentase pemenuhan sarana pemungutan PNBP pasca produksi (persen)	100	77,5	77,5
4	Korporasi nelayan yang dikembangkan	5	Jumlah korporasi nelayan yang dikembangkan (kelompok masyarakat)	1	1	100
5	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK	6	Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK (orang)	152,153	360.849	236
6	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayana	7	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (nilai)	92	97,79	106,29
		8	IP ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	79	83,83	106,11
		9	Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	86	100	116,28
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	70	100	142,86

SASARAN STRATEGIS		Kode IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	
				Tahun 2022	Tahun 2022	Persentase (%)
		11	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	75	96,15	128,20
		12	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	95	99,80	105,05

Bab 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipinggirkan, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, diamanatkan bahwa salah satu instrumen pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha penangkapan ikan. Perizinan usaha penangkapan ikan merupakan upaya pengendalian (control) untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya ikan. Selain itu, pelayanan usaha penangkapan ikan melalui perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka kepastian usaha penangkapan ikan.

Selain perubahan terhadap fokus kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan, juga terdapat perubahan terkait dengan alokasi anggaran dimana pada periode pemerintahan sebelumnya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengalokasikan sebagian besar anggarannya pada pembangunan pelabuhan perikanan, namun pada periode pemerintahan saat ini difokuskan kepada pengadaan kapal perikanan. Hal ini bertujuan untuk memprioritaskan pembangunan perikanan tangkap kepada nelayan sehingga nelayan secara langsung dapat memperoleh manfaat

dari kegiatan pembangunan perikanan tangkap. Di sisi lain, fokus pelabuhan perikanan adalah pada upaya pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan pelabuhan perikanan yang telah ada agar dapat difungsikan secara optimal. Keseluruhan pembangunan ini akan dilaksanakan secara efektif dan efisien pada tahun 2022 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang dan tetap dengan menjunjung aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2022, melakukan penyusunan Laporan Kinerja setiap triwulan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RPJMN 2020 – 2024 dan RKP tahun 2022. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Tangkap secara bertahap dari triwulan III sampai dengan triwulan IV dan akan dilanjutkan dengan menyusun Laporan kinerja (LKj) tahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode tahun 2022.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap triwulan III tahun 2022 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap triwulan III tahun 2022 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian dirumuskan suatu simpulan atau rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam

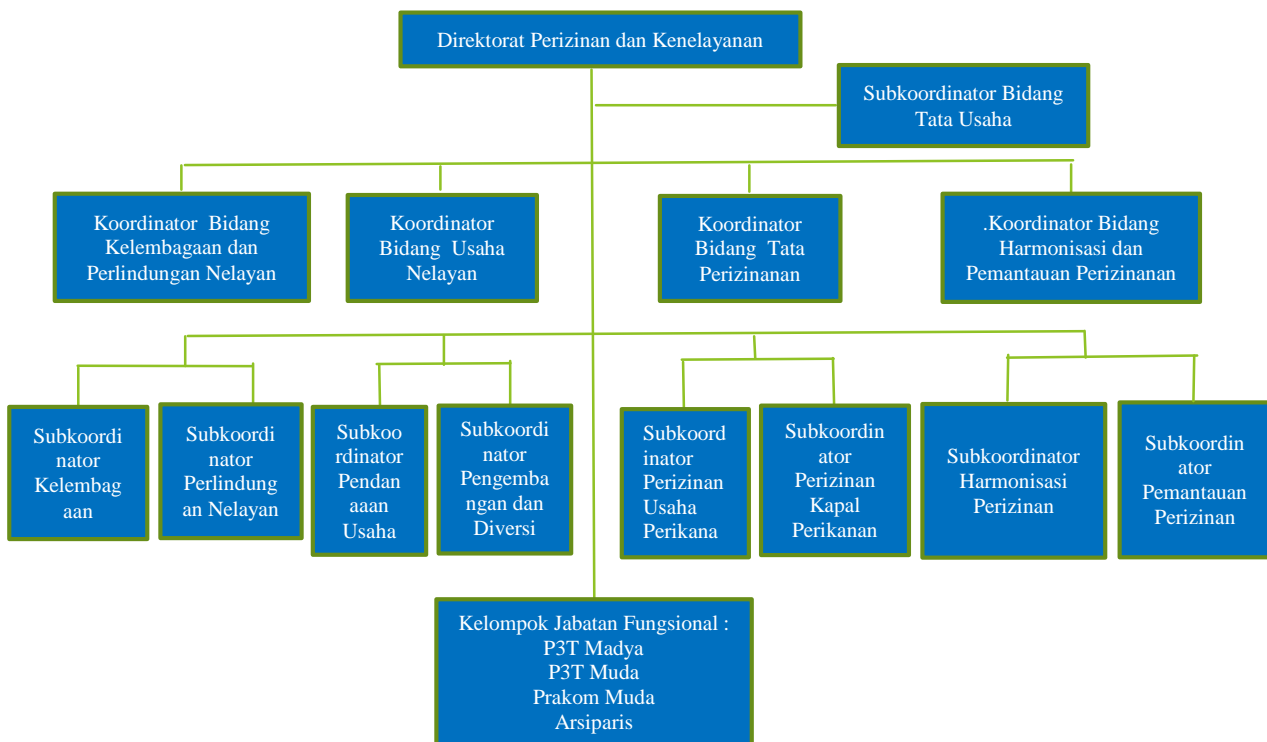
1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan kenelayanan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menyelenggarakan fungsi yakni:

1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang tata perizinan harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang tata perizinan harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
6. Pelaksanaan urusa tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Adapun susunan organisasi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan terdiri atas:

- a. **Koordinator Bidang Tata Perizinan**, yang terdiri atas Subkoordinator Perizinan Usaha Perikanan dan Subkoordinator Perizinan Kapal Perikanan,
- b. **Koordinator Bidang Harmonisasi dan Pemantauan Perizinan**, terdiri atas Subkoordinator Harmonisasi Perizinan dan Subkoordinator Pemantauan Perizinan,
- c. **Koordinator Bidang Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan**, terdiri atas Subkoordinator Kelembagaan dan Subkoordinator Perlindungan Nelayan,
- d. **Koordinator Usaha Nelayan**, terdiri atas Subkoordinator Pendanaan Usaha dan Subkoordinator Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Nelayan,
- e. **Subkoordinator Bidang Tata Usaha**; dan
- f. **Kelompok Jabatan Fungsional :**
 - Kelompok Jabatan Fungsional P3T Madya
 - Kelompok Jabatan Fungsional P3T Muda
 - Kelompok Jabatan Fungsional Prakom Muda
 - Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis



Gambar 1. Bagan Struktur organisasi Dit. PDK

1.3.1 Koordinator Bidang Tata Perizinan

Koordinator Bidang Tata Perizinan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan usaha perikanan, perizinan kapal perikanan, verifikasi dokumen kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, analisis pungutan kapal perikanan, analisis penyiapan dan penerbitan perizinan usaha dan kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Koordinator Bidang Tata Perizinan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang identifikasi, analisis dan verifikasi kelayakan rencana usaha perikanan, pemeriksaan dokumen kapal dan alat penangkap ikan, penghitungan dan validasi pungutan perikanan untuk surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin penangkapan ikan (SIPI)/Surat Izin Usaha Perikanan Indonesia (SIKPI), penerbitan perizinan usaha perikanan dan perizinan kapal perikanan, rekomendasi pemberian sanksi administrasi perizinan usaha perikanan dan perizinan kapal perikanan.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang identifikasi, analisis, dan verifikasi kelayakan rencana usaha perikanan, pemeriksaan dokumen kapal dan alat penangkap ikan, penghitungan dan validasi pungutan dan perikanan untuk SIUP dan SIPI/SIKPI, Penerbitan perizinan usaha perikanan dan perizinan kapal perikanan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria dibanding identifikasi, analisis dan verifikasi kelayakan rencana usaha perikanan, pemeriksaan dokumen kapal dan alat penangkap ikan, penghitungan dan validasi pungutan perikanan untuk SIUP dan SIPI/SIKPI, penerbitan perizinan usaha perikanan dan perizinan kapal perikanan;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang identifikasi, analisis dan verifikasi kelayakan rencana usaha perikanan, pemeriksaan dokumen kapal dan alat penangkap ikan, penghitungan dan validasi pungutan perikanan untuk SIUP dan SIPI/SIKPI, penerbitan perizinan usaha perikanan dan perizinan kapal perikanan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang identifikasi, analisis dan verifikasi kelayakan rencana usaha perikanan, pemeriksaan dokumen kapal dan alat penangkap ikan, penghitungan dan validasi pungutan perikanan untuk SIUP dan SIPI/SIKPI, penerbitan perizinan usaha perikanan dan perizinan kapal perikanan;

1.3.2 Koordinator Bidang Harmonisasi dan Pemantauan Perizinan

Koordinator Bidang Harmonisasi dan Pemantauan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan dibidang Harmonisasi dan Pemantauan perizinan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Koordinator Bidang Harmonisasi dan Pemantauan Perizinan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang implementasi system, integrasi dan pengelolaan data perizinan pusat dan daerah, pemantauan perizinan, pemberian sanksi administrative dan analisis laporan kegiatan usaha perikanan, serta pendampingan penerbitan dokumen kapal bantuan pemerintah;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang implementasi system, integrasi dan pengelolaan data perizinan pusat dan daerah, pemantauan perizinan, pemberian sanksi administrative dan analisis laporan kegiatan usaha perikanan, serta pendampingan penerbitan dokumen kapal bantuan pemerintah;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang implementasi system, integrasi dan pengelolaan data perizinan pusat dan daerah, pemantauan perizinan, pemberian sanksi administrative dan analisis laporan kegiatan usaha perikanan, serta pendampingan penerbitan dokumen kapal bantuan pemerintah;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang implementasi system, integrasi dan pengelolaan data perizinan pusat dan daerah, pemantauan perizinan, pemberian

- sanksi administrative dan analisis laporan kegiatan usaha perikanan, serta pendampingan penerbitan dokumen kapal bantuan pemerintah;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang implementasi system, integrasi dan pengelolaan data perizinan pusat dan daerah, pemantauan perizinan, pemberian sanksi administrative dan analisis laporan kegiatan usaha perikanan, serta pendampingan penerbitan dokumen kapal bantuan pemerintah;

1.3.3 Koordinator Bidang Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan

Koordinator Bidang Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang Kelembagaan dan perlindungan nelayan. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan kebijakan di bidang fasilitasi penumbuhan, pengembangan dan kerjasama/kemitraan/kelompok usaha bersama (KUB)/Koperasi/asosiasi/himpunan nelayan, identifikasi kelompok calon penerima bantuan, pendataan nelayan, pengelolaan kartu nelayan, klasifikasi nelayan, asuransi nelayan, dan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan serta upaya peningkatan ketahanan nelayan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penumbuhan, pengembangan dan kerjasama/kemitraan/kelompok usaha bersama (KUB)/Koperasi/asosiasi/himpunan nelayan, identifikasi kelompok calon penerima bantuan, pendataan nelayan, pengelolaan kartu nelayan, klasifikasi nelayan, asuransi nelayan, dan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan serta upaya peningkatan ketahanan nelayan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penumbuhan, pengembangan dan kerjasama/kemitraan/kelompok usaha bersama (KUB)/Koperasi/asosiasi/himpunan nelayan, identifikasi kelompok calon penerima bantuan, pendataan nelayan, pengelolaan kartu nelayan, klasifikasi nelayan, asuransi nelayan, dan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan serta upaya peningkatan ketahanan nelayan;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penumbuhan, pengembangan dan kerjasama/kemitraan/kelompok usaha bersama (KUB)/Koperasi/asosiasi/himpunan nelayan, identifikasi kelompok calon penerima bantuan, pendataan nelayan, pengelolaan kartu nelayan, klasifikasi nelayan, asuransi nelayan, dan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan serta upaya peningkatan ketahanan nelayan;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penumbuhan, pengembangan dan kerjasama/kemitraan/kelompok usaha bersama (KUB)/Koperasi/asosiasi/himpunan nelayan, identifikasi kelompok calon penerima bantuan, pendataan nelayan, pengelolaan kartu nelayan, klasifikasi nelayan, asuransi nelayan, dan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan serta upaya peningkatan ketahanan nelayan;

1.3.4 Koordinator Bidang Usaha Nelayan

Koordinator Bidang Usaha Nelayan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang pendanaan usaha serta pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Koordinator Bidang Usaha Nelayan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis kebutuhan modal, fasilitasi akses pendanaan nelayan melalui lembaga keuangan bank dan non bank, penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Konsultan Keuangan Keuangan Mitra (KKMB) bidang perikanan tangkap, pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan, serta pengembangan usaha alternative bagi nelayan dan keluarganya;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis kebutuhan modal, fasilitasi akses pendanaan nelayan melalui lembaga keuangan bank dan non bank, penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Konsultan Keuangan Keuangan Mitra (KKMB) bidang perikanan tangkap, pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan, serta pengembangan usaha alternative bagi nelayan dan keluarganya;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang analisis kebutuhan modal, fasilitasi akses pendanaan nelayan melalui lembaga keuangan bank dan non bank, penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Konsultan Keuangan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan tangkap, pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan, serta pengembangan usaha alternative bagi nelayan dan keluarganya;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang analisis kebutuhan modal, fasilitasi akses pendanaan nelayan melalui lembaga keuangan bank dan non bank, penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan tangkap, pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan, serta pengembangan usaha alternative bagi nelayan dan keluarganya;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang analisis kebutuhan modal, fasilitasi akses pendanaan nelayan melalui lembaga keuangan bank dan non bank, penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) bidang perikanan tangkap, pengembangan dan penganekaragaman usaha nelayan, serta pengembangan usaha alternative bagi nelayan dan keluarganya;

1.3.5 Subkoordinator Bidang Tata Usaha

Subkoordinator Bidang Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan kinerja dan barang milik Negara, Sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan kerumahtanggaan serta evaluasi dan pelaporan lingkup direktorat.

1.3.6 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional tersebut dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi yang transparan, dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Perizinan

dan Kenelayanan pertriwulan selama satu tahun berjalan. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan triwulanan sebagai berikut :

1. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

6. Lampiran

Isi dari lampiran merupakan kumpulan dari penetapan kinerja, pengukuran kinerja yang telah ditandatangani oleh Direktur Perizinan dan Kenelayanan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Bab 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama presiden tersebut di bidang perikanan tangkap yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pencapaian. Diharapkan pembangunan perikanan tangkap pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam misi, strategi dan upaya- upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.

Misi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya ikan melalui perizinan;
2. Penertiban dan peningkatan keberlanjutan usaha perikanan tangkap melalui perizinan

Moto dan maklumat pelayanan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Dalam melaksanakan fungsinya, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan memiliki MOTO ‘**Cepat Efektif Pasti Efisiensi dan Transparansi**’. Adapun **Maklumat** pelayanan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan sbb :

Seluruh unsur pimpinan dan staf Direktorat Perizinan dan Kenelayanan akan melakukan upaya – upaya pelayanan kepada masyarakat secara transparan, akurat dan akuntabel ;

1. Melaksanakan standar pelayanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah dan terjangkau serta tidak ada diskriminasi.
3. Menolak dan tidak menerima pemberian apapun yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik.
4. Menerima kritik dan pengaduan masyarakat serta secepatnya mengambil tindakan untuk memberikan solusinya.
5. Menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku apabila tidak melaksanakan standar pelayanan yang ada.

2.2 SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan capaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN DJPT 2020 – 2025, pada tabel berikut adalah target kinerja dan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2021.

Tabel 1. Rencana Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2022
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE				
1	Pengelolaan kenelayanan maju dan berdaya saing	1	Persentase pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing (persen)	100
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	2	Persentase pengelolaan perizinan berusaha sub sektor perikanan tangkap sesuai ketentuan (persen)	100
		3	Penerimaan PNBP sektor SDA lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (triliun)	1,627
3	Pengelolaan sarana pemungutan PNBP Pasca produksi	4	Persentase pemenuhan sarana pemungutan PNBP pasca produksi (persen)	100
4	Korporasi nelayan yang dikembangkan	5	Jumlah korporasi nelayan yang dikembangkan (kelompok masyarakat)	1
5	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK	6	Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK (orang)	153,152
LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE				
6	Tata kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	7	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (nilai)	92
		8	IP ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	79
		9	Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar	86
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	70
		11	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	75
		12	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	95

Pada Tahun 2022 anggaran pembangunan perikanan tangkap melalui program pengelolaan perikanan tangkap telah melalui beberapa revisi. Revisi terakhir adalah sebesar Rp. 80, 811, 793, 000,- Triliun dengan rincian untuk masing masing kegiatan adalah sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2022

NO	KEGIATAN	PAGU
		(Rp. 000)
1	Izin berusaha sub sektor penangkapan / pengangkutan ikan yang diterbitkan	2,253,061,000

2	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	1,352,596,000
3	Nelayan yang difasilitasi perlindungannya	26,810,132,000
4	Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	812,102,000
5	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	2,797,273,000
6	Nelayan yang yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	1,082,600,000
7	Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	1,232,000,000
8	Kampung nelayan yang difasilitasi penataannya	949,000,000
9	Kelembagaan usaha nelayan yang dikembangkan sebagai korporasi nelayan	3,388,000,000
10	Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang disalurkan	212,661,000
11	Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju)	8,000,000,000
12	Sarana penunjang pemungutan PNBP perikanan tangkap yang disediakan	28,007,272,000
13	Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	3,915,096,000
TOTAL		80,811,793,000

2.3 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU pada perspektif internal proses dan *learning and growth* sebagaimana pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
1	Persentase Pengelolaan kenelayan maju dan berdaya saing	1 Penyusunan / reviu juknis fasilitasi sertifikasi hak atas tanah (SEHAT) nelayan
		2 Pelaksanaan fasilitasi SEHAT Nelayan
		3 Supervisi dan evaluasi pelaksanaan SEHAT nelayan
		4 Penyusunan pedoman pengembangan usaha nelayan dan usaha keluarga nelayan
		5 Pelaksanaan pengembangan usaha nelayan dan usaha keluarga nelayan
		6 Evaluasi dan supervisi pengembangan usaha nelayan dan usaha keluarga nelayan
		7 Penyusunan / reviu pedoman usaha nelayan
		8 Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan)
		9 Evaluasi dan supervisi pengembangan usaha nelayan dan usaha keluarga nelayan
		10 Reviu dan sosialisasi petunjuk teknis kelembagaan usaha nelayan

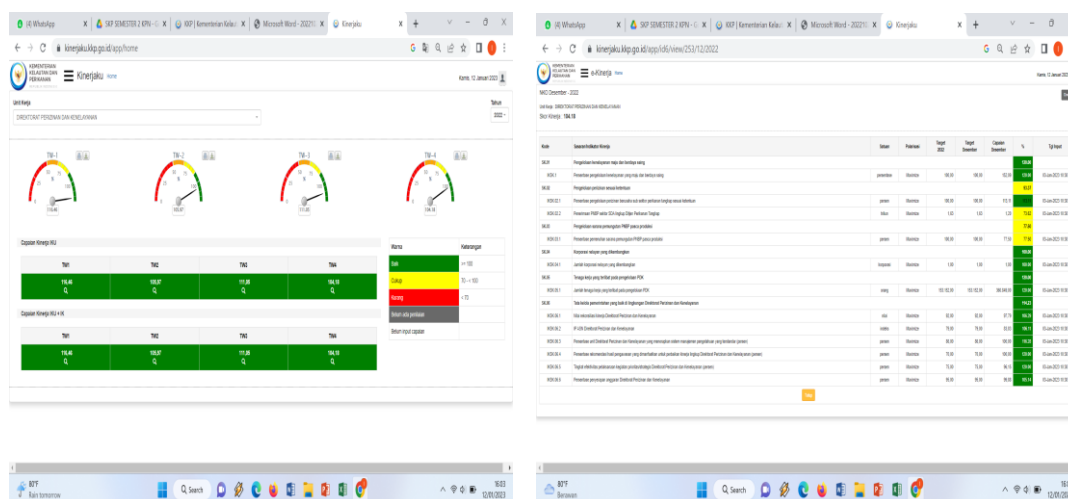
NO	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
		11 Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan 12 Supervisi dan evaluasi peningkatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan (KUB dan koperasi) 13 Reviu dan sosialisasi pedoman fasilitasi penataan kampung nelayan 14 Pelaksanaan fasilitasi penataan kampung nelayan 15 Reviu dan sosialisasi petunjuk teknis penataan kampung nelayan maju (KALAJU) 16 Pelaksanaan penataan kampung nelayan maju (Kalaju)
2	Presentase pengelolaan perizinan berusaha sub sektor perikanan tangkap sesuai ketentuan	1 Identifikasi, analisis dan verifikasi dokumen kapal perikanan 2 Evaluasi pemberian perizinan berusaha penangkapan / pengangkutan ikan 3 Penerbitan perizinan berusaha penangkapan / pengangkutan ikan 4 Penyusunan / reviu pedoman pengelolaan perizinan pusat dan daerah 5 Implementasi integrasi sistem perizinan pusat dan daerah 6 Analisis laporan kegiatan usaha (LKU) dan laporan kegiatan penangkapan (LKP) 7 Penataan dan evaluasi alokasi izin usaha penangkapan ikan 8 penghitungan dan validasi pungutan perusahaan perikanan 9 Penerbitan izin usaha penangkapan ikan 10 Reviu PNBP
3	Presentase pemenuhan sarana pemungutan PNBP Pasca Produksi (persen)	1 Identifikasi kebutuhan sarana penunjang pemungutan PNBP Pasca produksi 2 Pengadaan sarana penunjang pemungutan PNBP Pasca produksi 3 Sosialisasi dan pengoperasian sarana penunjang pemungutan PNBP Pasca produksi
4	Jumlah Korporasi nelayan yang dikembangkan	1 Penyusunan / reviu dan sosialisasi pedoman pengembangan korporasi nelayan 2 Pelaksanaan pengembangan korporasi nelayan 3 Pendampingan pengembangan korporasi nelayan 4 Supervisi, monitoring dan evaluasi pengembangan korporasi nelayan
5	Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan (PDK)	1 Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan (PDK)
6	Tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	1 Evaluasi Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (nilai) periode sebelumnya 2 Evaluasi penerapan disiplin dan kinerja pegawai 3 Updating data diklat, seminar dan pendidikan pegawai 3 Publikasi dan penyebaran informasi kegiatan prioritas Dit. PDK 4 Evaluasi dan tindak lanjut LHA 5 Laporan kegiatan prioritas / strategis lingkup Dit. PDK

NO	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
		6 Percepatan kegiatan lingkup Dit. PDK

Bab 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Guna mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka diperlukan adanya indikator kinerja dan target kinerja yang kemudian dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja (PK). Di dalam perjanjian kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, terdapat 6 (Enam) sasaran kegiatan dan 12 (Dua belas) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian kegiatan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menggunakan aplikasi www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II. Berdasarkan perjanjian kinerja di atas, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tampilan dashboard capaian Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2022 seperti pada gambar berikut:



Gambar 2. Dashboard capaian Aplikasi Kinerjaku

Capaian kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan pada Tahun 2022 pada dasarnya sudah baik, hal ini ditandai dengan indikator warna hijau pada capaian kinerja IKU dengan nilai sebesar **104,18** dan nilai capaian IKU dan IKK sebesar **104,18** akan tetapi Pencapaian IKU pada Tahun 2022 masih kurang jika dibandingkan dengan pencapaian triwulan sebelumnya yang mencapai angka 111,05. Hal ini dikarenakan ada beberapa indikator yang nilainya tidak mencapai target seperti penerimaan PNB sektor SDA lingkup Ditjen Perikanan tangkap yang hanya mencapai 1,192 Triliun Rupiah atau sebesar **73,33%** dari target tahunan yang sudah ditetapkan. Angka ini masih jauh dari nilai target yang ditetapkan sebesar **1,627** triliun rupiah. Kemudian ada IKU Persentase pemenuhan sarana pemungutan PNB pasca produksi yang hanya mencapai 77,5%. Adapun capaian indikator kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Capaian Sasaran Strategis (SK) Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	
				Tahun2022	% thd Target Tahunan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022		
				Tahun2022	% thd Target Tahunan	
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE						
1	Pengelolaan kenelayanan maju dan berdaya saing	1	Persentase pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing (persen)	100	152,09	152,09
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	2	Persentase pengelolaan perizinan berusaha sub sektor perikanan tangkap sesuai ketentuan (persen)	100	113,11	113,11
		3	Penerimaan PNBP sektor SDA lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (triliun)	1,627	1,193	1,193
3	Pengelolaan sarana pemungutan PNBP Pasca produksi	4	Persentase pemenuhan sarana pemungutan PNBP pasca produksi (persen)	100	77,5	77,5
4	Korporasi nelayan yang dikembangkan	5	Jumlah korporasi nelayan yang dikembangkan (kelompok masyarakat)	1	1	100
		6	Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK (orang)	153,152	360.849	236
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE						
5	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	7	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (nilai)	92	97,79	-106,29
		8	IP ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	79	83,83	106,11
		9	Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	86	100	116,28
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	70	100	142,86
		11	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	75	96,15	128,20
		12	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	95	99,80	105,05

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut :

3.2.1 Pengelolaan kenelayanan maju dan berdaya saing

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni (1) Persentase kenelayanan yang maju dan berdaya saing

1. Persentase kenelayanan yang maju dan berdaya saing

Persentase kenelayanan yang maju dan berdaya saing adalah rangkaian kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas hidup nelayan serta daya saing usaha, baik secara individu, kelompok maupun komunitas. Adapun proses penghitungannya di peroleh dari 8 komponen yaitu, (1) Persentase capaian nelayan yang difasilitasi perlindungannya, (2)

(2) Persentase capaian bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya, (3) persentase capaian nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya, (4) persentase capaian nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya, (5) persentase capaian Kelompok Usaha Bersama(KUB) yang meningkat kapasitas kelembagaannya, (6) persentase capaian kampung nelayan yang difasilitasi penataannya,

(7) persentase capaian Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang disalurkan, dan (8) persentase capaian kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (kalaju). Adapun capaian sampai dengan akhir Tahun 2022 adalah sebesar **152,09%**. Angka ini diperoleh dari rata-rata jumlah capaian persentase capaian nelayan yang difasilitasi perlindungannya sebesar **382,39%**, persentase capaian bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya sebesar **149,75%** dari target tahunan, persentase capaian nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya sebesar **109,50%** dari target tahunan, persentase capaian nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya sebesar **235,05%** dari target tahunan, persentase capaian Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang meningkat kapasitas kelembagaannya sebesar **100%** dari target tahunan, capaian kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (KALAJU) sebesar **140%** dari target tahunan, dan capaian kampung nelayan yang difasilitasi penataannya sebesar **100%**.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilanjutkan kegiatannya karena terdampak skema **Automatic Adjustment (AA)** dimana anggaran kegiatan tersebut mengalami pemotongan atau ditiadakan. Adapun kegiatan yang terdampak skema AA ini, salah satunya adalah kegiatan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Kegiatan yang sebelumnya sudah berjalan sampai dengan bulan Juni, namun kegiatan ini terpaksa harus dihentikan. Kemudian ada kegiatan persentase pemenuhan sarana pemungutan PNBP pasca produksi, juga terdampak karena adanya skema automatic adjustmen (AA) yang menyebabkan kegiatan sudah dianggap selesai pada bulan Oktober. Sehingga target capaian tidak dapat terealisasi secara maksimal. Blokir anggaran juga dapat mempengaruhi capaian kegiatan karena, adanya blokir anggaran dapat menghambat pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada nilai capaian kegiatan. Adapun kegiatan yang terkena dampak dari pemblokiran anggaran ini seperti kegiatan korporasi nelayan, meskipun demikian blokir anggaran dibuka kembali.

Tabel. 5 Persentase kenelayan yang maju dan berdaya saing

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2022	Target TW IV	Capaian Tahun2022	%
Persentase kenelayan yang maju dan berdaya saing	100	100	152,09	152,09

Capaian IKU ini **tidak dapat dibandingkan** dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, karena merupakan **IKU Baru** yang belum pernah ada sebelumnya.

3.2.2 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 2 (Dua) indikator yakni, (1) persentase pengelolaan perizinan berusaha sub sektor perikanan tangkap sesuai ketentuan, (2) Penerimaan PNBP sektor SDA lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Sejauh ini jumlah capaian setiap komponen pembentuk nilai persentase pengelolaan perizinan berusaha sub sector perikanan tangkap, baik itu jumlah alokasi ijin yang diterbitkan, jumlah realisasi kapal terhadap alokasi perizinan maupun jumlah provinsi yang mengintegrasikan system perizinan pusat dan daerah, dapat kita pantau langsung dari

aplikasi perizinan yaitu aplikasi SIMKADA dan aplikasi SILAT. *Permasalahan* yang terjadi saat ini adalah updating system aplikasi yang menyesuaikan perkembangan kebijakan terbaru seringkali menjadi kendala bagi para stakeholder dalam penggunaannya sehingga masih memerlukan pendampingan dan bimbingan secara teknis.

1. Persentase pengelolaan perizinan berusaha sub sektor perikanan tangkap sesuai ketentuan

Persentase capaian pengelolaan perizinan berusaha sub sektor perikanan tangkap merupakan persentase capaian yang dilaksanakan melalui izin berusaha sub sektor penangkapan/pengangkutan ikan yang diterbitkan, izin alokasi usaha perikanan tangkap (sesuai SIUP) yang diterbitkan serta integrasi system perizinan pusat-daerah melalui aplikasi SIMKADA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun **realisasi kapal** izin pusat terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP sampai dengan akhir Tahun 2022 mencapai **6.789** unit sedangkan **alokasi izin** mencapai **11.244** unit dan implementasi integrasi system perizinan daerah (SIMKADA) sebanyak **34** provinsi. Adapun capaian persentase pengelolaan perizinan berusaha sub sektor perikanan tangkap sesuai ketentuan Tahun 2022 sebesar **113,11%**. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai **100,52%** atau naik sebanyak 13,11 poin.

Tabel. 6 Persentase pengelolaan Perizinan berusaha sub sektor perikanan tangkap sesuai ketentuan

Nama IKU	Target Tahun 2022	Target TW IV	Capaian Tahun 2022	%
Persentase pengelolaan perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan sesuai ketentuan	100	100	113,11	113,11

Tabel. 7 Perbandingan persentase pengelolaan perizinan berusaha sub sector perikanan tangkap sesuai ketentuan.

SK 2											
Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan											
IKU 2											
Persentase pengelolaan perizinan berusaha sub sektor perikanan tangkap sesuai ketentuan											
Realisasi THN 2017-2021					Realisasi THN 2022					Renstra DJPT	
TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	Target Thn. 2022	Target TW IV	Realisasi	Realisasi thd target TW IV	Realisasi thd target Thn. 2022	Target Renstra 2024	capaian TW IV thd target akhir
-	93,36	-	101	100,52	100	100	113,11	113,11	113,11	100	113,11

Dari tabel perbandingan diatas dapat kita lihat bahwa persentase pengelolaan perizinan tahun 2022, mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Begitu juga dengan capaian pada tahun 2020, capaian IKU ini masih lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Untuk tahun 2019 dan Tahun 2017 IKU ini juga tidak ada capaian dikarenakan, persentase pengelolaan perizinan tidak masuk dalam IKU Dit. PDK. Tahun 2018 meskipun IKU ini tidak masuk dalam IKU utama tetapi menjadi IKU turunan yang tetap dilakukan penghitungan. Dapat disimpulkan bahwa capaian persentase pengelolaan perizinan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

2. Penerimaan PNB sektor SDA lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Penerimaan PNB sektor Sumber Daya Alam (SDA) adalah seluruh penerimaan Negara yang berasal bukan dari pajak melainkan penerimaan dari sektor perikanan yang ditentukan dari arah

operasional perikanan tangkap Sumber Daya Alam (SDA), seperti pendapatan pungutan hasil perikanan dan pungutan perusahaan perikanan tangkap. Tahun 2022, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan **menargetkan** penerimaan PNBPN sebesar Rp. **1,627 triliun**.

Adapun capaian PNBPN sektor SDA lingkup Ditjen Perikanan Tangkap pada Tahun 2022 sebesar **Rp. 1.193 triliun** atau sama dengan **1,23 triliun** rupiah atau sebesar **73,33 %** dari target tahunan (1,627). Angka ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, capaian ini merupakan capaian tertinggi sepanjang berdirinya KKP dan merupakan capaian tertinggi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Tidak tercapainya target PNBPN tahun 2022 disebabkan target PNBPN tidak berbanding lurus dengan pemenuhan sarana pemungutan PNBPN. Adapun metode penarikan PNBPN yang digunakan saat ini adalah metode penarikan pasca bayar. Metode ini dianggap paling efektif. Hal ini dikarenakan data pungutan hasil perikanan (PHP) akan lebih akurat dengan jumlah hasil tangkapan yang didaratkan oleh kapal penangkapan ikan. Akan tetapi penggunaan metode ini masih belum sepenuhnya dilakukan mengingat penggunaan metode ini harus didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup.

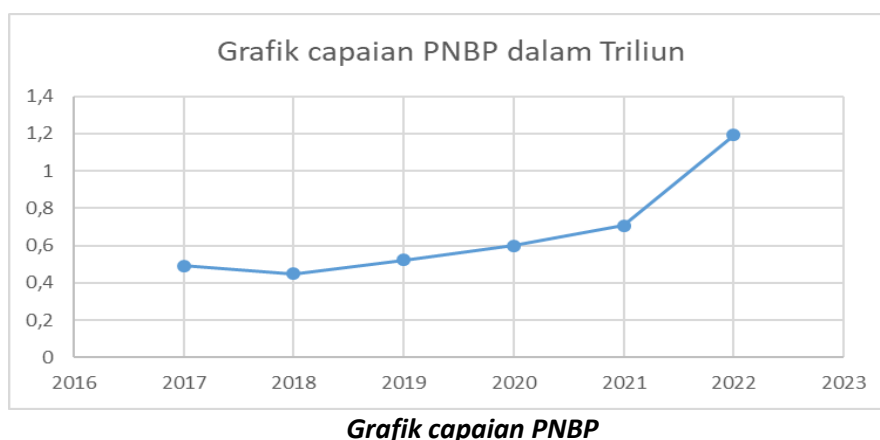
Tabel. 8 Penerimaan PNBPN sektor SDA lingkup Ditjen Perikanan Tangkap satuan : Triliun

Nama IKU	Target Tahun 2022	Target TW IV	Capaian Tahun 2022	%
Penerimaan PNBPN sector SDA lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	1,627	1,627	1,193	73,33

Tabel. 9 Perbandingan capaian Penerimaan PNBPN sektor SDA lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

SK 2		Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan									
IKU 3		Penerimaan PNBPN sektor SDA lingkup Ditjen Perikanan Tangkap									
Realisasi Tahun 2017-2021					Realisasi 2022					Renstra DJPT	
TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	Target Thn. 2022	Target TW IV	Realisasi Tahun 2022	Realisasi thd target TW IV Thn 2022	Realisasi thd target Thn. 2022	Target Renstra 2024	% capaian TW III thd target akhir Renstra
490,6	448,5	521,8	600,4	708,1	1,627	1,627	1,193	73,33	73,33		

Dari tabel perbandingan di atas dapat kita lihat bahwa, penerimaan PNBPN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Seperti yang kita ketahui, obyek pungutan Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) berupa pungutan hasil perikanan, merupakan pungutan yang menyumbang PNBPN sektor perikanan yang paling tinggi.



3.2.3 Pengelolaan Sarana Pemungutan PNBP pasca produksi

Pengelolaan sarana pemungutan PNBP pasca produksi ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni (1) Persentase pemenuhan sarana pemungutan PNBP pasca produksi. Persentase pemenuhan sarana pemungutan PNBP pasca produksi merupakan persentase pemenuhan sarana penunjang yang dibutuhkan dalam rangka penerapan pemungutan PNBP pasca produksi. Adapun penghitungan indikator ini diperoleh dari jumlah sarana pemungutan PNBP pasca produksi yang dipenuhi dibagi dengan jumlah sarana pemungutan PNBP pasca produksi yang direncanakan. Dalam rangka menunjang dan meningkatkan hasil PNBP pasca produksi, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan melalui pengadaan timbangan online diharapkan dapat menjamin integritas hasil data tangkapan yang telah ditimbang langsung tersimpan dalam system PIPP. Sehingga data tersebut dapat langsung menentukan perhitungan jumlah pungutan hasil perikanan yang akan dibayarkan oleh wajib bayar saat memperpanjang izin berusaha. Dalam rangka pencapaian kegiatan sarana pemungutan PNBP pasca produksi, telah dibentuk tim teknis dan tim *pendukung timbangan online* yang menjadi fokus dari sarana pemungutan PNBP pasca produksi. Selain itu juga telah dilakukan identifikasi kebutuhan timbangan online dipelabuhan perikanan dalam rangka penerapan pembayaran PNBP. Jumlah kebutuhan timbangan online yang ditargetkan pada tahun 2022 sebanyak 400 unit yang nantinya akan disebar keseluruh pelabuhan perikanan baik itu pelabuhan perikanan UPT pusat, pelabuhan perintis maupun pelabuhan perikanan swasta. Pengadaan timbangan online sendiri menjadi 2 tahap dengan sebaran 7 lokasi yaitu (1)*Tual dan Benjina* yang terletak di Maluku dan Papua, (2)*Ternate, Ambon, Merauke* (3)klaster Sumatera, (4)klaster Kalimantan, (5)klaster Sulawesi, (6)klaster Jawa1 dan (7)klaster Jawa2. Namun dalam pelaksanaan sampai dengan akhir Tahun 2022 Direktorat PDK hanya mampu merealisasikan **310** unit dari 400 unit

yang ditargetkan sehingga diperoleh persentase capaian sampai dengan akhir Tahun 2022, sebesar **77,5%** dari target tahunan yang telah ditetapkan. Ketidak tercapaian relisasi dengan

target, disebabkan adanya pengurangan anggaran atau ***automatic adjustment (AA)*** yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan per Bulan Oktober dianggap selesai meskipun belum mencapai target. Adapun capaian ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun tahun sebelumnya, mengingat IKU ini merupakan ***IKU Baru*** yang belum pernah ada sebelumnya.

Tabel. 10 Pengelolaan sarana pemungutan PNBP pasca produksi

satuan : %

Nama IKU	Target Tahun 2022	Target TW IV	Capaian Tahun 2022	%
Persentase pemenuhan sarana pemungutan PNBP pasca produksi	100	100	77,5	77,5

3.2.4 Korporasi nelayan yang dikembangkan

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni (1) jumlah korporasi nelayan yang dikembangkan. Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan :” Koperasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Korporasi nelayan merupakan kelembagaan usaha nelayan yang dikembangkan sebagai korporasi nelayan yang berbadan hukum diharapkan , dapat memfasilitasi masyarakat nelayan dalam

pengembangan usahanya serta memperoleh akses pendanaan usahanya.

Untuk **Capaian** sampai dengan akhir Tahun 2022 telah diperoleh capaian 1 korporasi yaitu **KUD Mino Saroyo** yang berlokasi di Kab. Cilacap. Adapun penetapan KUD Mino Saroyo sebagai korporasi karena model bisnis KUD Mino Saroyo dianggap sudah terkordinasi dengan baik dari hulu ke hilir. Untuk mendukung KUD Mino Saroyo sebagai korporasi, KKP dalam hal ini Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, melalui kegiatan pemberian identitas pelaku usaha (KUSUKA) , peningkatan kelembagaan, difersifikasi usaha, asuransi nelayan, digitalisasi pemasaran dan bantuan API. Tidak hanya itu, untuk mendukung kegiatan KUD Mino Saroyo, telah dilakukan kegiatan pengadaan sarana korporasi nelayan seperti pengadaan kendaraan truk tangki air dengan kapasitas 5000 L, pengadaan fork lift kapasitas 3 ton dan 1,5 ton, pengadaan sarana digitalisasi berupa printer, laptop, tablet, PC computer, smart tv dan proyektor.

Tabel. 11 Koorporasi nelayan yang dikembangkan

satuan : %

Nama IKU	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	%
Jumlah koorporasi nelayan yang dikembangkan.	1	1	100

Adapun capaian IKU ini **tidak dapat dibandingkan** dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, mengingat IKU ini **merupakan IKU baru** yang belum pernah ada ditahun sebelumnya.

3.2.5 Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni (1) Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK. Perhitungan indikator ini dilakukan dengan

menghitung semua jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam seluruh kegiatan terkait pengelolaan perizinan dan kenelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tenaga kerja yang dimaksud adalah petugas KKMB dan pojok pendanaan, petugas identifikasi CPCL SEHAT nelayan, instruktur/trainer dan petugas pendamping pada kegiatan diversifikasi usaha, tenaga kerja pada lembaga keuangan, petugas dan penyuluh perikanan pendamping BPAN, anggota KUB yang terlibat dalam penguatan kelembagaan, tenaga kerja persiapan kampung nelayan maju, pelaku usaha perorangan pengguna aplikasi SILAT dan SIMKADA, serta operator SIMKADA.

Adapun capaian indikator ini sampai dengan akhir Tahun 2022 sebanyak **360.849** orang. Capaian ini diperoleh dari jumlah tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap sebanyak *15.533 orang* (tenaga kerja langsung sebanyak 4.289 orang dan tenaga kerja tidak langsung sebanyak 11.244 orang). Kemudian dari kegiatan fasilitasi pengembangan usaha nelayan sebanyak *2.445 orang* (tenaga kerja langsung sebanyak 255 orang dan tenaga kerja tidak langsung sebanyak 2.190 orang). Untuk kegiatan fasilitasi sertifikasi bidang tanah nelayan, tenaga kerja yang terlibat sebanyak *9.996 orang* (tenaga kerja langsung sebanyak 262 orang, tenaga kerja tidak langsung sebanyak 9.734 orang). Pada kegiatan SIMKADA, tenaga kerja yang terlibat sebanyak *32.699 orang* (tenaga kerja langsung sebanyak 185 orang, tenaga kerja tidak langsung sebanyak 32.514 orang).

Pada kegiatan Kalaju tenaga kerja yang terlibat sebanyak 9.988 orang (tenaga kerja langsung sebanyak 581 orang, (tenaga kerja tidak langsung sebanyak 9.407 orang). Pada kegiatan asuransi, tenaga kerja yang terlibat sebanyak 284.336 orang. Angka ini diperoleh dari kegiatan asuransi mandiri dan kegiatan bakti nelayan. Pada kegiatan pendanaan usaha, tenaga kerja yang terlibat sebanyak 2.692 orang (tenaga kerja langsung sebanyak 925 orang, tenaga kerja tidak langsung sebanyak 2.037 orang). Kegiatan KUB tenaga kerja yang terlibat sebanyak 2.890 orang (tenaga kerja langsung sebanyak 390 orang, tenaga kerja tidak langsung sebanyak 2.500 orang). Sehingga total

keseluruhan tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan sebanyak **360.849** orang atau sebesar **236%** dari target yang ditetapkan.

Capaian IKU ini **tidak dapat dibandingkan** dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, mengingat IKU ini **merupakan IKU baru** yang belum pernah ada ditahun sebelumnya.

Tabel. 12 Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK

Satuan : orang

Nama IKU	Target Tahun 2022	Capaian Tahun2022	%
Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK.	153,152	360.849	236

3.2.6 Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayan

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 6 (enam) indikator yakni (1) Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat perizinan dan kenelayanan (2) IP ASN Direktorat Perizinana dan Kenelayanan (3) Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan system pengetahuan yang terstandar (4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat perizinan dan kenelayanan (5) Tingkat evektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat perizinan dan kenelayanan (6) Persentase penyerapan anggaran Direktorat perizinan dan keneayanan.

1. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

SAKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan (perencanaan strategik, perencanaan kerja). Adapun tujuan rekonsiliasi itu sendiri adalah (1) meningkatkan aspek pelaporan kinerja SAKIP, (2) meningkatkan konsistensi penerpan sistem manajemen kinerja pada SAKIP, (3) memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja. Output rekonsiliasi menggambarkan nilai kepatuhan, kesesuaian dan ketercapaian serta ketepatan masing masing unit kerja. Adapun **capaian** nilai rekonsiliasi kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2022 adalah **97,79**. Dengan perincian aspek **kepatuhan** memperoleh nilai 25 point, aspek kepatuhan ini dinilai dari kepatuhan dalam melakukan pelaporan. Aspek **kesesuaian** memperoleh nilai 25 point , aspek ini dinilai dari kesesuaian nilai yang dilaporkan dengan nilai yang diinput pada aplikasi kinerja dan kesesuaian target dengan Perjanjian Kinerja (**PK**). Aspek **ketercapaian** memperoleh nilai 27,79, point kemudian Aspek **ketepatan** dalam pelaporan dengan nilai 20 poin. Aspek ini diperoleh dari ketepatan waktu pelaporan dengan waktu yang di tentukan sebelumnya, jadi total nilai keseluruhan adalah 97,79 atau sebesar 106,29% dari target tahunan.

Tabel 13. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Nama IKU	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	%
Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	92	97,79	106,29

Adapun perbandingan nilai capaian dengan tahun tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

SK 6	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dit. Perizinan dan Kenelayanan											
IKU 7	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan											
Realisasi Tahun 2017-2021					Realisasi 2022					Renstra DJPT		
Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Thn. 2022	Target TW IV	Realisasi TW IV	Realisasi thd target TW IV Thn 2022	Realisasi thd target Thn. 2022	Target Renstra 2024	% capaian TW IV thd target akhir Renstra	
			86,70	94,94	92	92	97,79	106,29	106,29	80	122,2375	

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2017-2019 tidak ada capaian, karena IKU ini tidak masuk dalam PK Direktur, sehingga tidak dilakukan penghitungan. Penghitungan IKU ini baru dimulai pada tahun 2020, dengan nilai capaian sebesar 86,70. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan sebesar 8,24 poin atau sebesar 94,94. Kemudian pada tahun 2022 capaian ini kembali menunjukkan peningkatan, dengan nilai capaian sebesar 97,79 atau sebesar 106,29% dari target tahunan. Sehingga disimpulkan bahwa nilai IKU ini mengalami trend peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan sudah baik. Baik itu dari segi kepatuhan pelaporan, segi kesesuaian laporan maupun dari segi ketepatan waktu pelaporan. Adapun capaian nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan dapat dilihat dari grafik capaian dibawah.



Grafik nilai capaian nilai rekonsiliasi kinerja Dit. PDK

2. Indeks Profesionalitas (IP) ASN lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan

Indikator ini merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun.

Dalam penilaian indeks profesionalitas ASN dibagi menjadi 4 komponen sebagai berikut:

- (1) **Kualifikasi.** Berupa peningkatam kualifikasi melalui tugas dan izin belajar .
- (2) **Kompetensi.** Penghitungan Nilai komptensi dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut :
 - (a) Pejabat Struktural dihitung dengan kompenen yaitu DIKLATPIM, DIKLAT 20JP, SEMINAR (b) Pejabat fungsional dihitung melalui 3 komponen yaitu DIKLAT TEKHNIS/FUNGSIONAL, DIKLAT 20JP dan SEMINAR (c) Pejabat fungsional umum/staf dihitung dengan komponen DIKLAT 20 JP dan SEMINAR.
- (3) **Kinerja.** Berupa nilai SKP Pegawai
- (4) **Hukuman Disiplin,** berupa persentase jumlah penyelesaian kasus – kasus kepegawaian disbanding kasus – kasus yang dilaporkan.

Adapun capaian nilai IP ASN Tahun 2022 adalah **83,83** atau sebesar 106,11% dari target tahunan (79) yang sudah ditetapkan. Angka capaian pada semester I, menunjukkan bahwa capaian IP ASN sudah melebihi target tahunan. Hal ini juga menandakan adanya peningkatan terhadap kualifikasi dan kompetensi pegawai di lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Kesadaran pegawai dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya dengan mengikuti tugas belajar dan ijin belajar serta mengikuti berbagai seminar dan diklat sangat berpengaruh dalam mendongkrak nilai IP ASN. Semakin banyak pegawai yang mengikuti seminar maupun diklat akan semakin tinggi pula peluang dalam peningkatan IP ASN . Begitu juga dengan pengisian SKP pegawai secara berkala sangat membantu dalam menaikkan nilai IP ASN.

Permasalahan yang kadang terjadi adalah, kurangnya informasi yang didapatkan oleh pegawai terkait kegiatan seminar maupun diklat yang diadakan. Serta dorongan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Adapun kesempatan untuk memperoleh ijin belajar atau tugas belajar biasanya terkendala pada kuota pegawai yang dibolehkan untuk mengikuti ijin dan tugas belajar. Dalam mengantisipasi hal hal tersebut, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan telah melakukan langkah langkah antisipasi seperti gencar memberikan informasi terkait pelaksanaan seminar dan diklat kepada pegawai lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan melalui WA Grup direktorat dan mendorong seluruh pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan seminar baik yang dilakukan secara daring maupun secara luring. Selain itu,

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan juga menyelenggarakan seminar ataupun Bimtek yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Selain memberikan informasi terkait kegiatan kegiatan seminar dan diklat yang akan diselenggarakan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan juga memberikan informasi ijin dan tugas belajar secara terbuka dan membantu pegawai yang berminat untuk mengajukan ijin belajar ataupun tugas belajar.

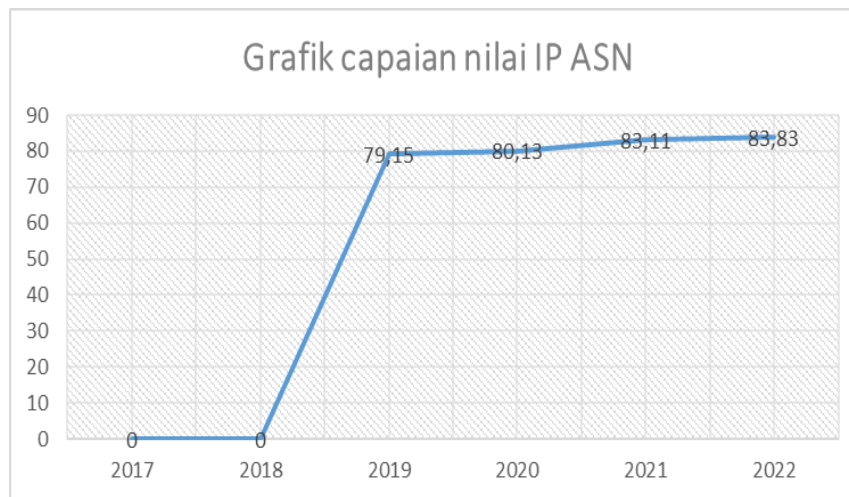
Tabel. 14 Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan

Nama IKU	Target Tahun 2022	Target TW IV	Capaian Tahun 2022	%
Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan	79	79	83,83	106,11

Adapun perbandingan capaian IKU IP ASN dapat dilihat dari table berikut :

SK 6 Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dit. Perizinan dan Kenelayanan											
IKU 8 IP ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan											
Realisasi Tahun 2017-2021					Realisasi 2022					Renstra DJPT	
Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Thn. 2022	Target TW IV	Realisasi TW IV	Realisasi thd target TW IV Thn 2022	Realisasi thd target Thn. 2022	Target Renstra 2024	% capaian TW IV thd target akhir Renstra
		79,15	80,13	83,11	79	79	83,83	106,11	106,11	80	104,7875

Dari table perbandingan capaian diatas dapat kita lihat bahwa capaian IP ASN menunjukkan trend peningkatan dari tahun ketahun. Meskipun di Tahun 2017-2018 tidak menunjukkan adanya nilai capaian dikarenakan pada tahun tersebut IKU ini tidak masuk dalam PK Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, sehingga memang tidak dilakukan penghitungan. Adapun grafik capaian nilai IP ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan dapat dilihat pada grafik di bawah



Grafik capaian nilai IP ASN

3. Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar

Sistem Manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penerapan manajemen pengetahuan lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan dilakukan melalui 3 komponen yakni : (1) Tingkat pemenuhan dokumen kinerja (2) Tingkat keikutsertaan pejabat dan staf dalam aplikasi Bitrix24 KKP dan (3) Tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi Bitrix24 KKP. Adapun capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Tahun 2022 adalah sebesar **100%** atau sebesar **116,28%** dari target tahunan.

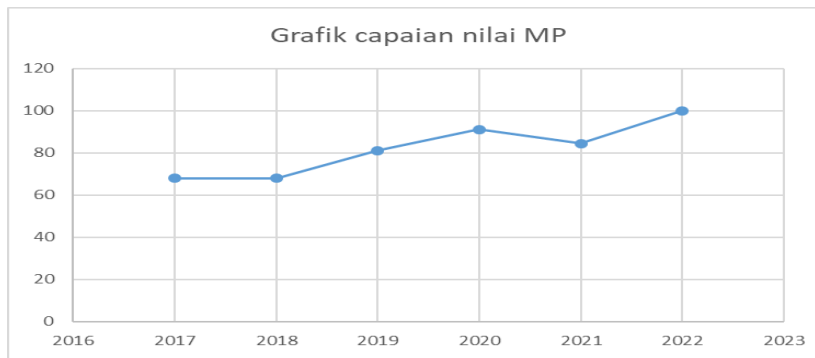
Tabel 15. Persentase Unit Dit.Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar

Nama IKU	Target Tahun 2022	Target TW IV	Capaian Tahun 2022	%
Persentase unit Dir. Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar	86	86	100	116,28

Tabel. 16 Tabel perbandingan capaian persentase MP

SK 6 Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dit. Perizinan dan Kenelayanan												
IKU 9 Persentase unit Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar												
Realisasi Tahun 2017-2021					Realisasi 2022					Renstra DJPT		
Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Target Thn. 2022	Target TW IV	Realisasi Tahun 2022	Realisasi thd target TW IV Thn 2022	Realisasi thd target Thn. 2022	Target Renstra 2024	% capaian Tahun 2022 target akhir Renstra	
68	68	81,02	91,5	84,34	86	86	100	116,2791	116,2791	90	111,1111	

Dari table diatas dapat dilihat bahwa capaian MP , pada dasarnya mengalami peningkatan meskipun di tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan. Akan tetapi di tahun 2021 ke 2022 nilai capaian kembali mengalami kenaikan.



Grafik capaian nilai MP

4. Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2021 s.d. Triwulan IV Tahun 2022 terdapat 2 temuan yang menjadi objek pengawasan namun demikian hasil temuan tersebut dapat ditindak lanjuti. Adapun capaian yang dapat dilaporkan sampai dengan akhir Tahun 2022 adalah sebesar **100%**. Dengan total temuan 2 kasus dan sudah ditindak lanjuti sebanyak 2 kasus. Semakin banyak temuan yang ditindak lanjuti *semakin kecil kasus* yang ditemukan dan *semakin tinggi capaian* persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan.

Tabel. 17 Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Nama IKU	Target Tahun 2022	Target TW IV	Capaian Tahun 2022	%
Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	70	70	100	142,86

Tabel. 18 Perbandingan capaian persentase hasil rekomendasi pengawasan

SK 6	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dit. Perizinan dan Kenelayanan											
IKU 10	Persentase nilai rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Dit. PDK											
Realisasi TW III 2017-2021					Realisasi 2022					Renstra DJPT		
TW III 2017	TW III 2018	TW III 2019	TW III 2020	TW III 2021	Target Thn. 2022	Target TW III	Realisasi TW III	Realisasi thd target TW III Thn 2022	Realisasi thd target Thn. 2022	Target Renstra 2024	% capaian TW III thd target akhir Renstra	
				19,35	70	70	100	142,86	142,86	80	125	

IKU Persentase hasil rekomendasi pengawasan pada tahun 2017-2020 tidak dimasukkan dalam PK Level 2, sehingga tidak dilakukan penghitungan terhadap IKU ini dan secara otomatis tidak memiliki nilai capaian.

5. Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan Merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan / efektifitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan. Dimana tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Adapun kegiatan dikategorikan prioritas / strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
- Memiliki anggaran yang besar
- Mendukung secara langsung target kinerja KKP
- Mendukung capaian prioritas nasional
- Merupakan arahan direktif Presiden, dan
- Pertimbangan lainnya yang relevan

Adapun kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan diantaranya Asuransi nelayan dalam hal ini BPAN. BPAN merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada nelayan demi keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan. Kampung Nelayan Maju (**KALAJU**) juga menjadi salah satu prioritas kegiatan di Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. "**KALAJU**" merupakan kegiatan penataan kawasan/lingkungan kampung nelayan yang bersih, sehat dan nyaman yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya nelayan. Adapun jenis bantuan pemerintah yang telah disalurkan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan adalah pengadaan **Vessel Monitoring Aid (VMA)** dengan lokasi penerima bantuan yakni Indramayu Provinsi Jawa Barat. Jumlah kelompok penerima sebanyak 16 kelompok.

Selain kegiatan prioritas tersebut diatas, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan juga telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti, (a). **Difersivikasi nelayan** , merupakan kegiatan peningkatan perluasan dan penganekaragaman usaha nelayan dan/ atau keluarganya untuk meningkatkan nilai tambah usaha nelayan serta sebagai upaya menghindari ketergantungan pada ketunggalan usaha. (b) **Fasilitasi kredit perikanan tangkap** , dimana kegiatan ini dilakukan melalui 3 kegiatan seperti kegiatan *expo* dan gerai pendanaan nelayan, merupakan percepatan fasilitasi permodalan khususnya melalui skema KUR atau skim lainnya bagi nelayan untuk mengembangkan usaha nelayan dengan mempertemukan nelayan dengan lembaga keuangan. *Pojok pendanaan nelayan, dan konsultan keuangan mitra bank.* (c) **SeHat Nelayan** merupakan kegiatan dalam upaya memberikan kekuatan hukum atas kepemilikan hak tanah nelayan. Seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah, ada beberapa kegiatan prioritas yang mengalami skema AA (*Automatic Adjustment*) sehingga anggaran mengalami pemotongan. Hal ini juga menjadi permasalahan yang belakangan ini sering terjadi. Adanya revisi anggaran yang dilakukan tidak hanya sekali dua kali, bahkan sampai melebihi, membuat para pengguna anggaran merevisi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan agar lebih efektif dan efisien. Capaian sampai dengan akhir Tahun 2022 adalah sebesar **96,15**.

Tabel. 19 Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR/E

Nama IKU	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	%
Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan	75	96,15	128,20

6. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Merupakan persentase serapan anggaran Direktorat perizinan dan kenelayanan pada periode berjalan. Penyerapan anggaran ini diukur dari jumlah realisasi pada periode berjalan dibagi dengan jumlah pagu yang ditetapkan. Penghitungan nilai capaian dilakukan secara semesteran, untuk capaian pada semester II tahun 2022 diperoleh nilai sebesar **99,80%** atau sebesar **105,05%** dari target tahunan.

Permasalahan yang terjadi adalah, seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah melalui pemberlakuan skema Automatic Adjustment (AA), secara otomatis mengurangi kegiatan kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan sebelumnya. Perubahan sistem rencana dan anggaran setiap tahunnya juga yang dapat mengakibatkan adanya *blokir* anggaran. Pemblokiran anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan di lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan jadi terhambat. Hal ini tentu saja berpengaruh pada jumlah serapan anggaran periode berjalan. **Untuk mengantisipasi** hal tersebut, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan **mengevaluasi kembali rencana aksi** yang sudah dibuat sebelumnya sekaligus **menyusun rencana aksi** kegiatan berikutnya dengan **merevisi** kembali **kegiatan** berikut **anggarnya** agar bisa dipergunakan secara efektif dan efisien.

Tabel. 20 Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan kenelayanan.

Nama IKU	Target Tahun 2022	Target TW IV	Capaian Tahun 2022	%
Persentase penyerapan anggaran Direktorat perizinan dan kenelayanan	95	95	99,80	105,05

Perbandingan nilai capaian persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan tidak dapat dilakukan karena IKU ini merupakan **IKU Baru** yang tidak ada di tahun tahun sebelumnya.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan pada tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 117.825.000.000,- sesuai dengan yang tercantum pada DIPA, Nomor : SP DIPA-032.03.1.238720/2022 tanggal 17 November 2021. Namun seiring dengan perkembangan kebijakan anggaran pemerintah, maka pada periode Triwulan IV tahun 2022, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan setelah melalui revisi anggaran , memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp. 80.811.793.000,-** dengan **realisasi** sampai dengan akhir Desember sebesar **Rp. 80.651.736.949,-** atau sebesar **99,80%** dari total anggaran . adapun alokasi dan realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2022, berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022, Berdasarkan jenis kegiatan

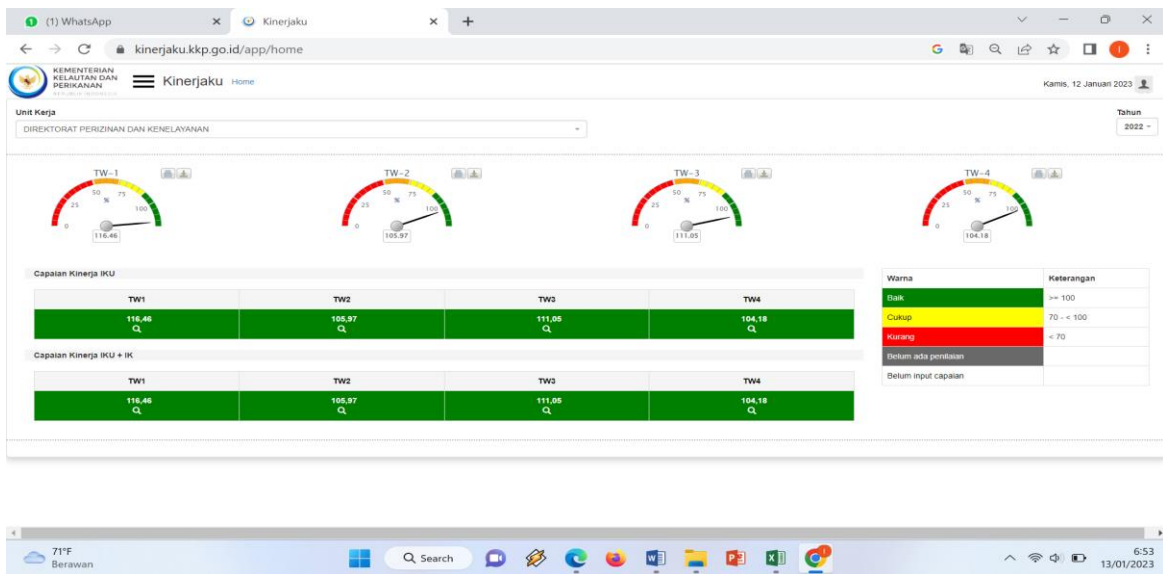
No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Izin berusaha sub sector penangkapan/pengangkutan ikan yang diterbitkan	2,253,061,000,-	2.246.066.890,-	99,69
2.	Nelayan yang difasilitasi perlindungannya	26.810.132.000	26.731.107.341	99,71
3.	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	1.352.596.000	1.345.801.883	99,50
4.	Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	812.102.000	805.788.330	99,22
5.	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	2.797.273.000	2.788.591.686	99,69
6.	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	1.082.600.000	1.076.173.512	99,41
7.	Kelompok usaha bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	1.232.000.000	1.224.342.930	99,38
8.	Kampung nelayan yang difasilitasi penataannya	949.000.000	945.038.500	99,58
9.	Kelembagaan usaha nelayan yang dikembangkan sebagai korporasi nelayan	3.388.000.000	3.381.797.750	99,82
10.	Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang disalurkan	212.661.000	212.196.800	99,78
11.	Kampung neayan yang ditingkatkan fasilitasnya (KALAJU)	8.000.000.000	7.976.591.934	99,71
12	Sarana penunjang pemungutan PNBP perikanan tangkap yang disediakan	28.007.272.000	28.005.904.195	100
13	Sistem perizinan pusat - daerah yang terintegrasi	3.915.096.000	3.912.335.198	99,93

	TOTAL	80.811.793.000	80.651.736.949	99,80
--	--------------	-----------------------	-----------------------	--------------

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2022 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai sebesar **104,18** persen sebagaimana pada Gambar berikut ini.



Gambar 3
Dashboard KINERJAKU Capaian Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2022

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Prioritas	Target 2022	Target Desember	Capaian Desember	%	Tgl Input
SK.01	Pengembangan ketenagakerjaan nelayan dan berdaya saing						100,00	
SK.01.1	Peningkatan pengelolaan ketenagakerjaan yang maju dan berdaya saing	personale	Maximisa	100,00	100,00	102,00	102,00	03-Jan-2023 10:38
SK.02	Pengembangan perizinan sesuai ketentuan						99,37	
SK.02.1	Perencanaan pengendalian penemuan biomassa sub sektor perikanan tangkap sesuai ketentuan	person	Maximisa	100,00	100,00	115,11	115,11	03-Jan-2023 10:38
SK.02.2	Perencanaan PIRBP sektor SKI tingkat Dijen Perikanan Tangkap	skor	Maximisa	1,00	1,00	1,20	120,00	03-Jan-2023 10:38
SK.03	Pengembangan sarana pemungutan PIRBP pasca produksi						77,00	
SK.03.1	Peningkatan pemenuhan sarana pemungutan PIRBP pasca produksi	person	Maximisa	100,00	100,00	77,50	77,50	03-Jan-2023 10:38
SK.04	Kooperasi nelayan yang dikembangkan						100,00	
SK.04.1	Jumlah koperasi nelayan yang dikembangkan	koperasi	Maximisa	1,00	1,00	1,00	100,00	03-Jan-2023 10:38
SK.05	Tinggkat kerja yang terlibat pada pengendalian PDK						100,00	
SK.05.1	Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengendalian PDK	orang	Maximisa	153.152,00	153.152,00	300.040,00	195,99	03-Jan-2023 10:38
SK.06	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan						114,23	
SK.06.1	Nilai rakornas kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	nilai	Maximisa	92,00	92,00	97,78	106,29	03-Jan-2023 10:38
SK.06.2	IP-ASDI Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	index	Maximisa	79,00	79,00	83,83	106,11	03-Jan-2023 10:38
SK.06.3	Perencanaan and Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menggunakan sistem manajemen pengendalian yang berbasis (genet)	person	Maximisa	86,00	86,00	100,00	116,29	03-Jan-2023 10:38
SK.06.4	Perencanaan rakornas hasil pengendalian yang berdampak untuk perbaikan kinerja tingkat Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (person)	person	Maximisa	70,00	70,00	100,00	120,29	03-Jan-2023 10:38
SK.06.5	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan proaktif/reaktif Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (person)	person	Maximisa	75,00	75,00	96,15	129,00	03-Jan-2023 10:38
SK.06.6	Peningkatan penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	person	Maximisa	95,00	95,00	99,88	105,14	03-Jan-2023 10:38

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, capaian kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan memperoleh hasil yang baik. Hal ini ditandai oleh indikator warna **hijau** pada capaian yang menandakan capaian diatas **>100** berarti **baik** (gambar dashboard kinerjajaku), Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRÉ

Namun jika dilihat dari segi *capaian per IKU, masih terlihat* adanya indikator yang berwarna kuning karena capaian masih dibawah 100% (>100%). IKU yang dimaksud adalah, IKU penerimaan PNBP dan IKU persentase pemenuhan sarana pemungutan PNBP pasca produksi.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada Bab III, hal – hal yang dapat disarankan untuk perbaikan pengelolaan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator kinerja yang tidak mencapai target :
 - a. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan agar melakukan formulasi ulang cara penetapan target dan pengukuran capaian indikator
 - b. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan agar mengidentifikasi penyebab – penyebab tidak tercapainya target dan menyusun rencana aksi percepatan kegiatan .
2. Hal – hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap indikator kinerja
 - b. Menyusun rencana aksi dan evaluasi rencana aksi per kegiatan secara berkala
 - c. Melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala.

DATA DUKUNG & DOKUMEN KEGIATAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

MEMORANDUM

Nomor: 63/DJPT.5/RC.610/I/2023

Yth : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Dari : Direktur Perizinan dan Kenelayanan
Hal : Penyampaian Capaian dan Data Dukung Indikator Kinerja Utama (IKU)
Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 13 Januari 2023

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.67/DJPT.1/TU.330/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 perihal Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Satker Pusat Tahun 2022, serta Bimbingan Tekhnis dan Verifikasi Pelaporan Berbasis Web (Kinerjaku, SMART, e-Monev), bersama ini kami sampaikan hasil capaian dan data dukung indikator kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ukon Ahmad Furkon

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Koordinator Kelompok Program, Sesditjen PT

Lampiran 1.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TAHUN 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022		
				Tahun2022	% thd Target Tahunan	
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE						
1	Pengelolaan kenelayanan maju dan berdaya saing	1	Persentase pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing (persen)	100	152,09	152,09
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	2	Persentase pengelolaan perizinan berusaha sub sektor perikanan tangkap sesuai ketentuan (persen)	100	113,11	113,11
		3	Penerimaan PNBP sektor SDA lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (triliun)	1,627	1,193	1,193
3	Pengelolaan sarana pemungutan PNBP Pasca produksi	4	Persentase pemenuhan sarana pemungutan PNBP pasca produksi (persen)	100	77,5	77,5
4	Korporasi nelayan yang dikembangkan	5	Jumlah korporasi nelayan yang dikembangkan (kelompok masyarakat)	1	1	100
		6	Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK (orang)	153,152	360.849	236
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE						
5	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	7	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (nilai)	92	97,79	-106,29
		8	IP ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	79	83,83	106,11
		9	Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	86	100	116,28
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	70	100	142,86
		11	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	75	96,15	128,20
		12	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	95	99,80	105,05

Lampiran 2.
DATA DUKUNG CAPAIAN

- a. SK1 Pengelolaan Kenelayanan maju dan berdaya saing, IKU 1.
Persentase kenelayanan yang maju dan berdaya saing

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	TARGET				CAPAIAN TW 4	PERSEN
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1 Persentase pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing	100	25	50	75	100	152,09	152,09
a Nelayan yang difasilitasi perlindungannya	16.000	2000	3000	5.000	16.000	61182	382,39
b Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	7.500	1000	5000	6500	7500	9734	149,75
c Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	2.000	200	1500	1800	2000	2190	109,50
d Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	756	0	500	700	756	1.777	235,05
e Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	2.500	200	600	2000	2500	2500	100,00
f Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang disalurkan	120.000	0	50000	100000	120000	0	0,00
g Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju)	10	1	3	3	10	14	140,00
h Kampung nelayan yang difasilitasi penataannya	40	0	12	15	40	40	100,00

- b. SK2 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 2. Persentase pengelolaan perizinan berusaha subsector perikanan tangkap sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	TARGET				CAPAIAN TW 4	PERSEN
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
2 Persentase pengelolaan perizinan berusaha sub sektor perikanan tangkap sesuai ketentuan)	100	25	50	75	100	113,11	113,11
a Jumlah alokasi izin yang diterbitkan (unit)	10.000	9500	9600	9800	10000	11244	112,44
b Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi perizinan sesuai SIUP (SIP/SKPI) (unit)	5.350	5300	5325	5340	5350	6789	126,90
c Jumlah provinsi yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah (provinsi)	34	31	32	33	34	34	100,00

- c. SK2. Pengelolaan Perizinan sesuai Ketentuan, IKU 3. Penerimaan PNPB sector SDA lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

REKAPITULASI REALISASI PNPB SUMBERDAYA ALAM (SDA) TA 2022							
NO.	BULAN	JENIS PUNGUTAN		TOTAL REALISASI	KETERANGAN	TARGET TA 2022	%
		PHP	PPP				
1	Januari	108.753.526.885,00	8.369.867.331,00	117.123.394.216,00	117.123.394.216,00	135.650.299.000,00	86,34
2	Februari	166.419.790.452,00	10.214.708.555,00	176.634.499.007,00	293.757.893.223,00	135.650.299.000,00	130,21
3	Maret	105.101.084.116,00	9.504.387.959,00	114.605.472.075,00	408.363.365.298,00	135.650.299.000,00	84,49
4	April	56.598.425.472,00	5.833.870.000,00	62.432.295.472,00	470.795.660.770,00	135.650.299.000,00	46,02
5	Mei	54.336.799.830,00	2.201.646.374,00	56.538.446.204,00	527.334.106.974,00	135.650.299.000,00	41,68
6	Juni	87.259.453.408,00	5.133.102.675,00	92.392.556.083,00	619.726.663.057,00	135.650.299.000,00	68,11
7	Juli	62.925.691.271,00	6.883.480.000,00	69.809.171.271,00	689.535.834.328,00	135.650.299.000,00	51,46
8	Agustus	99.313.334.661,00	8.087.155.000,00	107.400.489.661,00	796.936.323.989,00	135.650.299.000,00	79,17
9	September	74.866.846.702,00	2.948.690.000,00	77.815.536.702,00	874.751.860.691,00	135.650.299.000,00	57,36
10	Oktober	75.948.084.552,00	2.137.632.500,00	78.085.717.052,00	952.837.577.743,00	135.650.299.000,00	57,56
11	November	63.917.263.696,00	2.123.150.000,00	66.040.413.696,00	1.018.877.991.439,00	135.650.299.000,00	48,68
12	Desember	166.615.807.455,00	7.341.165.762,00	173.956.973.217,00	1.192.834.964.656,00	135.650.315.000,00	128,24
TOTAL		1.122.056.108.500,00	70.778.856.156,00	1.192.834.964.656,00		1.627.803.604.000,00	73,28

(Dalam triliun)

- d. SK3 Pengelolaan sarana pemungutan PNPB pasca produksi , IKU 4. Persentase pemenuhan sarana pemungutan PNPB pascca produksi

Progress Timbangan Online	
Tahap I	Jumlah unit
Tual dan Benjina (Maluku dan Papua)	12
Ternate, Ambon Merauke, Ukurlaran (Maluku Papua)	16
Klaster Sumatera	30
Klaster Kalimantan	7
Klaster Sulawesi	17
Klaster Jawa 1	28
Klaster Jawa 2	18
Total	128
Tahap II	
Tual dan Benjina (Maluku dan Papua)	18
Ternate, Ambon Merauke, Ukurlaran (Maluku Papua)	22
Klaster Sumatera	27
Klaster Kalimantan	30
Klaster Sulawesi	30
Klaster Jawa 1	30
Klaster Jawa 2	25
Total	182
JUMLAH	310
Target	400
capaian	310
persentase	77,5

Target 400 unit = 100%
 Realisasi 310 unit = $310/400 * 100 = 77,5\%$

- e. SK4 Korporasi nelayan yang dikembangkan, IKU 5 Jumlah korporasi nelayan yang dikembangkan

KUNJUNGAN LAPANG OLEH TIM DAN KSP

- Tempat Peladangan Ikan (TPI) Higienis PPS Cilacap
- SPDN/SPBB Mino Saroyo
- TPI Tegaklatanya
- Kantor KUD Mino Saroyo
- Kantor HNSI Cilacap

HASIL VERIFIKASI LAPANGAN

- Depati III KSP : model bisnis KUD Mino Saroyo sudah terkoordinasi dengan baik dari hulu ke hilir. Pemerintah akan memfasilitasi perkembangan KUD Mino Saroyo
- Bagian sedang menyusun paragraf hukum regulasi terkait Korporasi
- Mekanisme pemodalan KUD Mino Saroyo bersumber dari baik dari simpanan wajib maupun simpanan pokok yaitu antara lain dari LPMUKP, LPDP.
- KSP akan mendukung untuk pelaksanaan Korporasi nelayan KUD Mino Saroyo ini antara lain melalui kegiatan pemberian identitas pelaku usaha (KUSUKA), peningkatan kelembagaan, diversifikasi usaha, asuransi nelayan, dilakukani pemasaran berbasis APIS.

RENCANA TINDAK LANJUT

- Anggaran korporasi masih status dibekali oleh Kemendes, diharapkan dari KSP dan Bagian dapat membantu untuk pembebanan biaya tersebut
- Penyusunan pertemuan dan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya sehingga diharapkan Korporasi nelayan dapat berjalan optimal
- Dibutuhkan Dasar Hukum Setingkat Menteri guna Menyusun Petunjuk Teknis mengenai Korporasi Nelayan

DUKUNGAN KSP PADA KORPORASI NELAYAN
 Kunjungan ke KUD Mino Saroyo

- f. SK5 Korporasi nelayan yang dikembangkan, IKU 6 Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat

PDK	Tenaga Kerja Tahun 2022 (orang)		
	Tenaga Kerja Langsung	Tenaga Kerja Tidak Langsung	Jumlah
Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap	4.289	11.244	15.533
Fasilitasi pengembangan usaha nelayan	255	2.190	2.445
Fasilitasi sertifikasi bidang tanah nelayan	262	9.734	9.996
SIMKADA	185	32.514	32.699
Kampung Nelayan Maju	581	9.407	9.988
Bantuan Premi Asuransi Nelayan	211.836	72.500	284.336
Pendanaan Usaha	925	2.037	2.962
KUB	390	2.500	2.890
Total			360.849

- g. SK6 Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, IKU 7. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan.

Unit	Nilai Aspek				Total Nilai
	Kepatuhan	Kesesuaian	Ketercapaian	Ketepatan	
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	25	25	28,65	20	98,65
	Catatan: 1) Pada tahun 2022, Dit. PSDI terdapat 11 Indikator Kinerja, terdiri dari 7 IK Tahunan, 2 IK Semesteran, 2 IK Triwulanan. 2) Aspek Kepatuhan, Kesesuaian, dan Ketepatan telah selaras dan mendapatkan nilai 100.				
Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	25	25	27,79	20	97,79
	Catatan: 1) Pada tahun 2022, Dit. PSDI terdapat 12 Indikator Kinerja, terdiri dari 4 IK Tahunan, 2 IK Semesteran, 6 IK Triwulanan. 2) Aspek Kepatuhan, Kesesuaian, dan Ketepatan telah selaras dan mendapatkan nilai 100.				
Sekretariat Ditjen PT	25	25	26,32	20	96,32
	Catatan: 1) Pada tahun 2022, Dit. PSDI terdapat 15 Indikator Kinerja, terdiri dari 8 IK Tahunan, 5 IK Semesteran, 2 IK Triwulanan. 2) Aspek Kepatuhan, Kesesuaian, dan Ketepatan telah selaras dan mendapatkan nilai 100.				

- h. SK6 Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, IKU 8. IP ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (Bobot 25)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN TANGKAP	89	14,37	57,48 %	33,36	83,4 %	25,2	84 %	4,96	99,2 %	77,89	SEDANG
2	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN	53	15,4	61,6 %	28,49	66,23 %	25,75	85,83 %	5	100 %	84,64	TINGGI
3	DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	53	16,58	62,32 %	32,88	82,2 %	28,16	87,17 %	5	100 %	78,62	SEDANG
4	DIREKTORAT KEPERLUANAN PERIKANAN	51	16,08	64,32 %	32,55	81,38 %	29,69	85,63 %	5	100 %	79,31	SEDANG
5	DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	73	14,29	59,5 %	31,33	78,3 %	27,23	80,77 %	5	100 %	83,31	TINGGI
6	SALAJUDJAN PERIKANAN IKAN	73	14,4	57,6 %	32,28	80,2 %	27,07	83,57 %	4,96	99,2 %	83,71	TINGGI
7	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NEZAM CACHMAN JAKARTA	52	12,31	49,24 %	36,56	96,4 %	24,37	81,23 %	5	100 %	80,23	SEDANG
8	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	62	13,15	52,6 %	35,04	87,6 %	24,69	82,3 %	5	100 %	77,68	SEDANG
9	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	59	16,22	49,88 %	39,19	97,97 %	25,08	83,6 %	5	100 %	79,5	SEDANG
10	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	49	11,29	45,6 %	35,44	90,1 %	25,12	83,73 %	5	100 %	76,95	SEDANG
11	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	50	12,12	46,48 %	38,6	96,5 %	25,4	84,67 %	5	100 %	81,12	TINGGI
12	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	38	13,47	53,88 %	36,6	95,5 %	25,28	84,27 %	5	100 %	80,35	SEDANG
13	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	42	10,48	41,92 %	39,64	94,1 %	25	83,33 %	5	100 %	80,12	SEDANG
14	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALAUHARAU	52	12,06	46,24 %	39,42	98,55 %	23,17	77,23 %	5	100 %	78,65	SEDANG
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TEMATE	34	11,91	47,64 %	39,56	98,9 %	25	83,33 %	5	100 %	81,47	TINGGI

- i. SK6 Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, IKU 9. Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)

Keaktifan	Target	Capaian	%
Level 2	6	6	100%
Level 3	24	24	100%
Level 4	54	54	100%
Total	84	84	100%

Komponen	Capaian	Bobot	%
Dokumen	100,00	20	20,00
Keikutsertaan	100,00	10	10,00
Keaktifan	100,00	70	70,00
TOTAL			100,00

- j. SK6 Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, IKU 10. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)

Rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2022 Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

No	No LHP	Objek Pemeriksaan	Temuan Awal			Tindak Lanjut			Sisa Temuan						
			Temuan (Kejadian)	Saran	Nilai Keuangan	Temuan (Kejadian)	Saran	Nilai Keuangan	Temuan		Saran		Nilai Keuangan		
									Proses	Pending	Proses	Pending	Proses	Pending	
1	R.180/IT.J.2/HP.130/VIII/2022	Audit Pengadaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Pelabuhan (Timbangan Online) TA 2022	1	8	2.182.416,00	1	8	2.182.416,00	-	-	-	-	-	-	-
13	R.206/IT.J.2/HP.130/IX/2022	Audit Kegiatan Penataan Kampung Nelayan Maju pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap TA 2022	7	13	-	13	-	-	6	-	10	-	-	-	-
Rekap Triwulan III 2021			8	21	2.182.416,00	1	21	2.182.416,00	6	-	10	-	-	-	-
Rekap Total			8	21	2.182.416,00	1	21	2.182.416,00	6	-	10	-	-	-	-
Persentase (%)									100,00%	75,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0%	0,00%

Rekomendasi 21 Tindak lanjut 21
 Persentase 100,00%

- k. SK6 Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, IKU 11. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan.

Unit	Nilai Aspek				Total Nilai
	Kepatuhan	Kesesuaian	Ketercapaian	Ketepatan	
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	25	25	28,65	20	98,65
	Catatan: 1) Pada tahun 2022, Dit. PSDI terdapat 11 Indikator Kinerja, terdiri dari 7 IK Tahunan, 2 IK Semesteran, 2 IK Triwulanan. 2) Aspek Kepatuhan, Kesesuaian, dan Ketepatan telah selaras dan mendapatkan nilai 100.				
Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	25	25	27,79	20	97,79
	Catatan: 1) Pada tahun 2022, Dit. PSDI terdapat 12 Indikator Kinerja, terdiri dari 4 IK Tahunan, 2 IK Semesteran, 6 IK Triwulanan. 2) Aspek Kepatuhan, Kesesuaian, dan Ketepatan telah selaras dan mendapatkan nilai 100.				
Sekretariat Ditjen PT	25	25	26,32	20	96,32
	Catatan: 1) Pada tahun 2022, Dit. PSDI terdapat 15 Indikator Kinerja, terdiri dari 8 IK Tahunan, 5 IK Semesteran, 2 IK Triwulanan. 2) Aspek Kepatuhan, Kesesuaian, dan Ketepatan telah selaras dan mendapatkan nilai 100.				

I. SK6 Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, IKU 12. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL DIT. PDK TA 2022							
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;							
Periode 31 Desember 2022							
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2022			%	SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode		
JUMLAH SELURUHNYA	80.811.793.000	0	70.756.840.601	9.894.896.348	80.651.736.949	99,80 %	160.056.051
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	80.811.793.000	0	70.756.840.601	9.894.896.348	80.651.736.949	99,80 %	160.056.051
HB.2339 Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	80.811.793.000	0	70.756.840.601	9.894.896.348	80.651.736.949	99,80 %	160.056.051
ACA Perizinan Produk	2.253.061.000	0	1.828.897.890	417.169.000	2.246.066.890	99,69 %	6.994.110
ACA.001 Izin berusaha sub sektor penangkapan/pengangkutan ikan yang diterbitkan	2.253.061.000	0	1.828.897.890	417.169.000	2.246.066.890	99,69 %	6.994.110
051 Identifikasi, analisis dan verifikasi dokumen kapal perikanan	202.349.000	0	190.349.000	9.450.000	199.799.000	98,74 %	2.550.000
052 Evaluasi pemberian perizinan berusaha penangkapan/pengangkutan ikan	180.682.000	0	179.715.500	0	179.715.500	99,47 %	966.500
053 Penerbitan perizinan berusaha penangkapan/pengangkutan ikan	1.870.030.000	0	1.458.833.390	407.719.000	1.866.552.390	99,81 %	3.477.610
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	26.810.132.000	0	21.977.445.444	4.753.661.897	26.731.107.341	99,71 %	79.024.659
BDC.001 Nelayan yang difasilitasi perlingkungannya	26.810.132.000	0	21.977.445.444	4.753.661.897	26.731.107.341	99,71 %	79.024.659
051 Penyusunan/reviu dan sosialisasi pedoman fasilitasi perlindungan nelayan	401.341.000	0	401.204.000	0	401.204.000	99,97 %	137.000
052 Fasilitasi perlindungan nelayan	26.408.791.000	0	21.576.241.444	4.753.661.897	26.329.903.341	99,70 %	78.887.659
PCA Perizinan Produk	1.352.596.000	0	1.308.084.277	37.717.606	1.345.801.883	99,50 %	6.794.117
PCA.001 Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	1.352.596.000	0	1.308.084.277	37.717.606	1.345.801.883	99,50 %	6.794.117
051 Penataan dan evaluasi alokasi izin usaha penangkapan ikan	654.970.000	0	610.481.430	37.717.606	648.199.036	98,97 %	6.770.964
052 Penghitungan dan validasi Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP)	303.105.000	0	303.084.849	0	303.084.849	99,99 %	20.151
QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4.691.975.000	0	3.650.446.356	1.020.107.172	4.670.553.528	99,54 %	21.421.472
QDC.002 Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	812.102.000	0	573.645.295	232.143.045	805.788.330	99,22 %	6.313.670
051 Penyusunan/reviu juknis fasilitasi sertifikasi hak atas tanah (SeHAT)	10.728.000	0	5.030.000	4.960.000	9.990.000	93,12 %	738.000
051 nelayan	10.728.000	0	0	0	9.990.000	93,12 %	738.000
052 Pelaksanaan fasilitasi SeHAT nelayan	425.193.000	0	328.970.050	92.877.545	421.847.595	99,21 %	3.345.405
053 Supervisi dan evaluasi pelaksanaan SeHAT nelayan	376.181.000	0	239.645.235	134.305.500	373.950.735	99,41 %	2.230.265
QDC.003 Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	2.797.273.000	0	2.278.068.439	510.523.247	2.788.591.686	99,69 %	8.681.314
051 Penyusunan pedoman pengembangan usaha nelayan dan usaha keluarga nelayan	222.553.000	0	150.506.340	70.065.100	220.571.440	99,11 %	1.981.560
052 Pelaksanaan pengembangan usaha nelayan dan usaha keluarga nelayan	2.000.000.000	0	1.917.370.899	80.991.594	1.998.362.493	99,92 %	1.637.507
053 Evaluasi dan supervisi pengembangan usaha nelayan dan usaha keluarga nelayan	574.720.000	0	210.191.200	359.466.553	569.657.753	99,12 %	5.062.247
QDC.004 Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	1.082.600.000	0	798.732.632	277.440.880	1.076.173.512	99,41 %	6.426.488
052 Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan)	1.012.031.000	0	729.718.010	277.440.880	1.007.158.890	99,52 %	4.872.110
053 Evaluasi penyaluran pendanaan usaha nelayan	70.569.000	0	69.014.622	0	69.014.622	97,80 %	1.554.378
QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	5.569.000.000	0	4.364.532.460	1.186.646.720	5.551.179.180	99,68 %	17.820.820
QDD.002 Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	1.232.000.000	0	1.132.921.930	91.421.000	1.224.342.930	99,38 %	7.657.070
051 Reviu dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Kelembagaan Usaha Nelayan	25.200.000	0	0	23.999.500	23.999.500	95,24 %	1.200.500
052 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Nelayan	623.967.000	0	619.796.930	3.065.000	622.861.930	99,82 %	1.105.070
053 Supervisi dan Evaluasi peningkatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan (KUB dan Koperasi)	582.833.000	0	513.125.000	64.356.500	577.481.500	99,08 %	5.351.500
QDD.004 Kampung nelayan yang difasilitasi penataannya	949.000.000	0	557.192.500	387.846.000	945.038.500	99,58 %	3.961.500
051 Reviu dan sosialisasi pedoman fasilitasi penataan kampung nelayan	34.900.000	0	8.877.500	26.022.500	34.900.000	100,00 %	0
053 Pelaksanaan fasilitasi penataan kampung nelayan	914.100.000	0	548.315.000	361.823.500	910.138.500	99,57 %	3.961.500
QDD.005 Kelembagaan usaha nelayan yang dikembangkan sebagai korporasi nelayan	3.388.000.000	0	2.674.418.030	707.379.720	3.381.797.750	99,82 %	6.202.250
051 Penyusunan/reviu dan sosialisasi pedoman pengembangan korporasi	340.020.000	0	259.495.030	80.146.970	339.642.000	99,89 %	378.000
051 nelayan	340.020.000	0	0	0	339.642.000	99,89 %	378.000
052 Pelaksanaan pengembangan korporasi nelayan	2.134.000.000	0	2.044.573.000	88.750.000	2.133.323.000	99,97 %	677.000
053 Pendampingan Pengembangan Korporasi Nelayan	400.250.000	0	189.175.000	209.400.000	398.575.000	99,58 %	1.675.000
054 Supervisi, monitoring dan evaluasi pengembangan korporasi nelayan	513.730.000	0	181.175.000	329.082.750	510.257.750	99,32 %	3.472.250
QEA Bantuan Masyarakat	212.661.000	0	212.196.800	0	212.196.800	99,78 %	464.200
QEA.002 Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang disalurkan	212.661.000	0	212.196.800	0	212.196.800	99,78 %	464.200
051 Reviu dan Sosialisasi petunjuk teknis bantuan premi asuransi nelayan	2.820.000	0	2.820.000	0	2.820.000	100,00 %	0
053 Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Premi Asuransi Nelayan	209.841.000	0	209.376.800	0	209.376.800	99,78 %	464.200
QEH Bantuan Kelompok Masyarakat	8.000.000.000	0	7.348.257.215	628.334.719	7.976.591.934	99,71 %	23.408.066

